

### **BAB III**

#### **SAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**

Pada dasarnya *framing* adalah metode atau cara media memberitakan atau menceritakan suatu realitas peristiwa. Setiap institusi media memiliki *framing* yang berbeda, bahkan untuk satu peristiwa yang sama. Sebagai individu dan sebagai bagian dari sebuah institusi media, wartawan atau reporter yang menjadi ujung tombak penyaji berita juga memiliki *framing* yang berbeda untuk satu peristiwa. Sejak awal proses produksi berita, yaitu saat melakukan penentuan angle, pembuatan daftar pertanyaan untuk wawancara, peliputan dan penelitian, seorang wartawan sudah memiliki kotak pemikirannya sendiri. Berita yang disajikan di media massa sudah bukan lagi cermin dari kondisi yang sebenarnya, namun merupakan hasil seleksi *framing* yang dilakukan oleh insan-insan redaksional di sebuah media.

Pada tanggal 19 Oktober 2011 jam 09.00 WIB, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik para menteri dan wakil menteri yang baru. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena objek atau sumber yang diberitakan adalah tentang pengangkatan menteri dan ditambahkan dengan pengangkatan wakil menteri. Sejumlah kalangan banyak yang menyayangkan atas peristiwa tersebut, karena dengan pengangkatan wakil menteri akan menambah kabinet menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Keadaan semacam ini akhirnya mendapat perhatian yang besar dari berbagai pihak, terutama media termasuk media online Kompas.com dan Detikcom.

Sebagai media online yang sudah cukup memiliki dedikasi, kedua media tersebut tentunya dapat mempengaruhi pemikiran khalayak pembacanya dalam melihat suatu realitas atau peristiwa. Media online yang pada dasarnya bersifat komersial, memiliki beragam tujuan seperti: memberi informasi, mencatat, menyajikan hiburan, dan isu yang bersifat umum dan terbuka. Setiap media online tersebut pastinya mempunyai tujuan dan latar belakang yang berbeda. Latar belakang ideologi kedua media tersebut kemudian melahirkan perbedaan dalam melihat dan memaknai peristiwa pengangkatan para menteri dan wakil menteri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 19 Oktober 2011, sesuai dengan pandangan konstruksi sosial yang beranggapan bahwa setiap orang dapat mempunyai konstruksi yang berbeda-beda dalam melihat realitas yang sama. Hal ini terlihat dari berita-berita yang ditulis oleh kedua media online tersebut. Perbedaan itulah yang kemudian menarik peneliti untuk meneliti pemberitaan tentang pengangkatan para menteri dan wakil menteri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 19 Oktober 2011.

Penelitian ini menggunakan analisis *framing* untuk menganalisis pemberitaan tentang pengangkatan wakil menteri. Objek kajian dalam penelitian ini adalah pemberitaan pengangkatan wakil menteri oleh presiden dalam dua media online terkemuka di Indonesia yaitu kompas.com dan detikcom. Kedua media online tersebut memuat pemberitaan pengangkatan wakil menteri selama kurang lebih satu bulan. Sebagai objek dari penelitian ini, peneliti mengambil berita dalam rentang waktu lima belas hari yaitu mulai tanggal 10 Oktober hingga

25 Oktober 2011. Berikut ini adalah judul-judul pemberitaan dalam dua media online Kompas.com dan Detikcom.

#### A. Sajian Data

Tabel 3.1 Judul-Judul Pemberitaan Dalam Media Online Kompas.com dan Detikcom

No.	Tanggal	Kompas.com	Detikcom
1.	10 Oktober 2011	Pengangkatan Wakil Menteri Harus Dikaji Ulang	
2.	12 Oktober 2011		Jelang Reshuffle, SBY Minta Menteri Tak Buat Kebijakan Strategis
3.	13 Oktober 2011		a. PKS: Posisi Wakil Menteri Bukti SBY Masih Didikte Kepentingan b. Inilah Pidato Lengkap di Cikeas Jelang Reshuffle
4.	14 Oktober 2011	Wakil Menteri Harus Tingkatkan Capaian Kabinet	
5.	15 Oktober 2011		Posisi Calon Menteri dan Wamen Masih Bisa Disesuaikan
6.	16 Oktober 2011		a. Presiden Harus Perhatikan Aturan Pengangkatan Wakil

No.	Tanggal	Kompas.com	Detikcom
			Menteri b. Golkar: Denny Indrayana Tak Penuhi Syarat Menjadi Wakil Menteri c. Ibas: Pengangkatan Wakil Menteri untuk Mempercepat Pembangunan
7.	17 Oktober 2011	Tengah Malam, Amir Syamsuddin dapat Kabar Jadi Menteri	a. PDIP: Wakil Menteri Sebaiknya dari Pejabat Eselon Satu Kementerian b. Angkat Wamen, SBY Cari Selamat dari tekanan Partai Koalisi c. PD: Penambahan Wamen Tidak Membuat Gemuk Kabinet
8.	18 Oktober 2011	Jangan Cuma Jadi Ban Serep	a. Usai Tes Kesehatan, Djan Faridz 'Menghilang' b. Priyo: Kabinet Baru Terlalu Gemuk c. Sudi: Tidak Ada Bargaining Soal Pergantian Menteri
9.	19 Oktober 2011	a. Kinerja	a. Pramono: Menteri Tak

No.	Tanggal	Kompas.com	Detikcom
		Pemerintahan Akan Membaik b. Ayo Kabine SBY Gencar Bikin Keselamatan Jalan c. Paradoks Yudhoyono	Maksimal & Jadi Sorotan Tak Diganti b. Jimly: Wamen Terlalu Banyak, Tidak Terlalu Diperlukan c. <i>Reshuffle</i> Kabinet Masih Belum Selesaikan Masalah Ekonomi
10.	20 Oktober 2011		Ical: Indonesia Besar karena itu Perlu Banyak Wakil Menteri
11.	22 Oktober 2011	Menhuk dan HAM Diganti Untuk Lindungi Lingkaran Korupsi?	
12.	23 Oktober 2011	Gertak Sambal	
13.	25 Oktober 2011	Kabinet Baru Tak Cerminkan Harapan Rakyat	

Sumber: *Kompas.com dan Detikcom*, disusun kembali oleh peneliti, 2011.

## B. Pembahasan

Pada penelitian ini dilakukan analisis *framing* terhadap dua media online detikcom dan kompas.com. Analisis *framing* pada kedua media tersebut berkaitan dengan topik yang sedang hangat dibicarakan masyarakat pada bulan Oktober 2011, yaitu tentang pelantikan menteri dan wakil menteri yang baru. Seperti diketahui, pelantikan tersebut menuai banyak kritik dari berbagai pihak, baik

politisi maupun kalangan awam. Selanjutnya, masing-masing berita dari kedua media tersebut akan dideskripsikan berdasarkan unit-unit yang diamati untuk mengetahui *framing* yang terdapat pada kedua media tersebut.

## 1. Kompas.com

### Frame: Pelantikan Wakil Menteri Dinilai Tidak Efektif

#### 1) Pengangkatan Wakil Menteri Harus Dikaji Ulang (Kompas.com, Senin, 10 Oktober 2011)

Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011, Kompas.com menyajikan berita dengan *headline* "pengangkatan wakil menteri oleh presiden di beberapa kementerian harus dikaji ulang". *Headline* tersebut menunjukkan kompas.com ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa peristiwa pelantikan wakil menteri tidak disetujui oleh banyak pihak. Pelantikan wakil menteri dinilai banyak pihak hanya memboroskan uang negara dan tidak efektif

**Skema.** Skema dalam penelitian ini meliputi *headline*, *lead*, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan dan penutup. Ketidakefektivan tersebut juga didukung dengan adanya *lead* berita yang isinya apabila tujuan pelantikan menteri untuk meningkatkan kinerja, sebaiknya diangkat oleh presiden berdasarkan usulan dari menteri yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kontraproduktif karena dimungkinkan terjadi ketidakcocokan antara menteri dengan wakil menteri tersebut. Dengan adanya *lead* tersebut, kompas.com ingin

menonjolkan sisi negatif dari pengangkatan dan pelantikan wakil menteri yang telah dilakukan oleh Presiden SBY. Hal tersebut didukung dengan adanya latar informasi, yaitu Senin (10/10/2011) yang menunjukkan pendapat dari pengamat politik yang menjadi narasumber dalam berita tersebut.

Pada skema dalam berita ini juga terdapat kutipan pernyataan narasumber yang menyebutkan bahwa pengangkatan wakil menteri hanya akan menimbulkan kekisruhan dan adu kuat politik seperti dalam kutipan berikut ini.

“Kondisi ini hanya akan menimbulkan kekisruhan dan adu kuat politik di kementerian yang bersangkutan.” (kompas.com, 10/10/2011).

Kutipan di atas sepertinya sengaja ditampilkan oleh kompas.com untuk lebih memperkuat argumen bahwa pengangkatan wakil menteri sungguh tidak efektif dan merugikan. Untuk memperkuat argumen tersebut, kompas.com juga memunculkan kutipan lain, yaitu sebagai berikut ini.

“Sekalipun adalah hak untuk memiliki ambisi, namun jika ada wakil menteri menghabiskan waktunya dengan bermanuver politik untuk menggapai ambisinya, maka hanya akan menimbulkan kegaduhan politik internal dan kemerosotan kerja kementerian. Ini pada gilirannya merugikan publik,” papar Hendardi yang menegaskan langkah wakil menteri bermanuver politik adalah tidak pantas dan tidak etis. (kompas.com, 10/10/2011).

Kutipan di atas merupakan sesuatu yang ingin ditonjolkan oleh kompas.com, bahwa peristiwa pelantikan wakil menteri lebih banyak

menimbulkan sisi negatif daripada sisi positifnya. Wakil menteri yang telah dilantik dikhawatirkan akan lebih banyak mementingkan untuk bermanuver politik dan melupakan kinerjanya di kementerian. Pada kutipan di atas, kompas.com juga ingin menonjolkan argumen dari narasumber bahwa sikap wakil menteri yang bermanuver politik merupakan hal yang tidak etis. Pernyataan narasumber tersebut mendominasi isi berita sehingga kronologis peristiwa pelantikan wakil menteri nyaris diabaikan.

Pada bagian skema, kompas.com juga menampilkan pernyataan wartawan yang menyebutkan bahwa meskipun wakil menteri diangkat oleh presiden, namun wakil menteri tetap pembantu menteri yang bertugas lebih spesifik internal dan fungsi administratif kementerian. Dalam hal ini, wartawan ingin mengungkapkan bahwa para wakil menteri tidak boleh seenaknya bersikap hanya karena dirinya diangkat oleh presiden dan posisinya tetap di bawah menteri sehingga tidak dapat seenaknya mendominasi di kementerian. Pada setiap berita, biasanya terdapat kata-kata penutup yang berisi kesimpulan yang dibuat oleh wartawan untuk menyelesaikan apa yang diberitakannya. Namun, pada berita ini, kompas.com sengaja tidak mengakhiri berita yang dibuat dengan sebuah kata penutup. Akhir berita dibiarkan begitu saja dengan adanya kalimat kutipan dari narasumber. Kompas.com ingin lebih banyak menonjolkan argumen dari narasumber dan membiarkan



pembaca yang menyimpulkan akhir berita tersebut. Sikap wartawan seringkali membiarkan akhir berita tanpa adanya penutup dan menyerahkan akhir berita kepada pembaca karena ingin mengajak pembaca untuk lebih kritis dalam menelaah berita.

**Kelengkapan berita.** Pada berita ini, unsur 5W+1H tidak lengkap. Wartawan hanya menyampaikan unsur apa, siapa, kapan dan oleh siapa dan bagaimana, namun tidak menampilkan di mana peristiwa pelantikan wakil menteri dilaksanakan. Dalam hal ini, wartawan lebih menitikberatkan pada apa dan bagaimana pelantikan wakil menteri dilakukan. Unsur apa dalam berita ini, yaitu pengangkatan wakil menteri oleh presiden di beberapa kementerian harus dikaji ulang. Unsur "bagaimana" dalam berita ini, yaitu terletak pada bagian lead yang menyatakan bahwa "jika tujuannya untuk lebih memacu kinerja kementerian yang bersangkutan, seyogyanya dipilih dan diangkat oleh presiden melalui usulan menteri yang bersangkutan dan dapat saja usulan itu terdiri dari beberapa nama." Selanjutnya, wartawan mengabaikan unsur yang lain seperti kapan peristiwa ini terjadi.

## **2) Wakil Menteri, Jangan Cuma Jadi Ban Serep (Selasa, 18 Oktober 2011).**

Berdasarkan judul di atas telah dapat dinilai bahwa pihak kompas.com ingin menampilkan sisi negatif dari peristiwa pelantikan wakil menteri. Selain itu, pada bagian skema, yaitu pada *headline*,

menampilkan pernyataan wartawan, yaitu pengangkatan wakil menteri hendaknya tidak cuma menjadi ban serep, melainkan harus diberi kewenangan yang memadai disertai dengan *job description* yang jelas dan lengkap. Pernyataan wartawan tersebut sebenarnya merupakan kesimpulan dari seluruh isi berita dan ditampilkan pada bagian *headline*.

Selanjutnya, dalam berita ini ditampilkan sebuah *lead*, yang merupakan kalimat kutipan pernyataan narasumber, Aribowo (pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya). Aribowo, sebagai narasumber menyatakan apabila menteri hanya berfungsi sebagai ban serep, maka kinerja kementerian tidak akan bisa maksimal. Selain itu, ada potensi ketidakharmonisan antara menteri dan wakil menteri yang menyebabkan kekisruhan kinerja kementerian, seperti pada kutipan berikut ini.

“Kalau sekadar jadi ban serep, pengangkatan wakil menteri tidak akan bisa maksimal. Apalagi ada potensi hubungan menteri dengan wakilnya belum tentu harmonis sehingga malah mengganggu kinerja kementerian.” (kompas.com, 18 Oktober 2011).

Dalam berita ini, terdapat sebuah latar informasi, yaitu Selasa (18/10/2011). Latar informasi ini ditampilkan untuk menunjukkan waktu narasumber menyampaikan pendapatnya, yaitu pada hari Selasa (18/10/2011). Namun, dalam berita ini tidak memuat latar informasi yang lain, misalnya tempat narasumber menyampaikan pendapatnya, atau berapa lama waktu wawancara wartawan dengan narasumber. Wartawan

sengaja menyembunyikan latar informasi tersebut, mungkin karena dinilai tidak penting untuk ditampilkan.

Selanjutnya kompas.com juga menampilkan kutipan yang mendukung pemberitaan negatif dari peristiwa pelantikan wakil menteri. Salah satu kutipan dalam berita ini juga merupakan *lead* berita, jadi dalam satu kutipan memiliki 2 fungsi sekaligus, yaitu sebagai *lead* dan sebagai kutipan dari pernyataan narasumber. Kutipan lain juga dimunculkan dalam berita ini, yang juga sekaligus berfungsi sebagai kalimat penutup yang menyatakan jika SBY mampu menjadi dirijen yang baik, maka dengan *reshuffle* kabinet yang dilakukan sekarang ini akan dapat mempercepat pemakaian program. Kutipan selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut ini.

“Jika mampu menjadi dirijen yang baik dan kuat yang bisa menggerakkan kekuatan birokrasi ini, maka target *reshuffle* kabinet untuk mempercepat pencapaian program akan bisa terealisasi.” (kompas.com, 18/10/2011).

Wartawan memberikan pernyataan yang negatif dalam berita ini dengan menyebutkan bahwa menteri dari partai politik mengecewakan karena mengangkat staf khusus, tim ahli atau apapun istilahnya yang kerjanya memainkan proyek di kementerian seperti yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), hal ini tidak bisa dikontrol oleh presiden. Selain itu wartawan juga memberikan pernyataan lanjutan untuk menampilkan alasan presiden mengangkat wakil menteri dengan menyatakan bahwa untuk itulah presiden mengangkat

wakil menteri dari kalangan birokrat, profesional atau teknokrat. Tujuannya agar bisa dicapai keseimbangan. Tidak terjadi politisasi birokrat secara massif. Selain itu, wartawan juga memberikan pernyataan yang tidak mendukung pelantikan wakil menteri, yaitu dengan mengatakan bahwa memang dengan jumlah wakil menteri yang cukup besar, yaitu 19 orang, berarti birokrasi juga bertambah besar.

**Kelengkapan berita.** Unsur 5W+1H dalam berita ini lengkap, semua unsur ditampilkan dalam berita. Unsur "apa" terletak pada kalimat yang dinyatakan oleh wartawan pada bagian *headline*, yaitu "pengangkatan wakil menteri hendaknya tidak cuma menjadi ban serep, melainkan harus diberi kewenangan yang memadai disertai dengan *job description* yang jelas dan lengkap." unsur "siapa" yang dibicarakan dalam berita ini adalah para menteri dan wakil menteri serta presiden sendiri. Sedangkan unsur "oleh siapa" para menteri dibicarakan, yaitu oleh narasumber berita "Aribowo, pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya. Unsur "kapan" narasumber menyatakan pendapatnya, yaitu Selasa (18/10/2011) dengan unsur "di mana", yaitu di Surabaya.

Wartawan sengaja menampilkan kelengkapan unsur 5W+1H dengan tujuan pembaca dapat mengetahui isi berita secara mendetail yang berkaitan dengan apa, siapa, kapan, di mana, oleh siapa dan bagaimana peristiwa dalam berita ini terjadi. Wartawan menganggap unsur-unsur

tersebut penting untuk ditampilkan, sehingga tidak disembunyikan dan tidak diabaikan. Meskipun wartawan menampilkan pendapat narasumber yang menyatakan kebaikan dan kekurangan pelantikan wakil menteri, namun secara umum wartawan menyimpulkan bahwa pelantikan wakil menteri tidak efektif. Hal itu dapat dilihat dari pernyataan wartawan yang telah dikemukakan di atas.

### 3) Paradoks Yudhoyono (Rabu, 19/10/2011)

**Skema.** Pada bagian *headline* tertera suatu kalimat yang cukup panjang, yaitu sebagai berikut ini.

“Hari-hari ini kita disugahi drama Cikeas. Sejumlah tokoh datang bertandang karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang. Media menaruh mereka di deretan nama yang sedang digadang-gadang masuk jajaran kabinet.” (kompas.com, 19/10/2011).

Kalimat tersebut didukung oleh sebuah *lead* atau kalimat pengantar sebelum isi, yaitu sebagai berikut ini.

“Judul drama itu: Perombakan Kabinet. Ini sebetulnya bukan drama pertama. Drama sejenis kita tonton pada akhir Oktober 2009 saat SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II. Drama ini bagi saya, menegaskan sejumlah paradoks SBY.” (kompas.com, 19/10/2011).

Sekali membaca kalimat-kalimat tersebut, pembaca diajak untuk berpikir ada apa sebenarnya tentang drama Cikeas tersebut. Dengan adanya kalimat tersebut, kompas.com ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa terdapat peristiwa yang menarik untuk diketahui yang terjadi di Cikeas. Ternyata, setelah dibaca, pembaca selanjutnya akan mengetahui bahwa drama yang terjadi di Cikeas adalah pemanggilan

beberapa pejabat penting di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk diwawancarai berkaitan dengan *reshuffle* kabinet.

Pada bagian latar informasi juga disebutkan bahwa presiden memanggil calon menteri dan calon wakil menteri secara atraktif. Hal ini dianggap karena presiden ingin menunjukkan kepada publik bahwa dirinya bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya, namun yang terjadi justru membuat kabinet makin tambun. Dalam berita ini, tidak ditemukan kutipan hasil wawancara wartawan dengan responden karena berita ini semacam artikel yang dikirim oleh seseorang yang bernama Eep Saefulloh Fatah, yang kemudian disebut sebagai narasumber berita. Kalimat-kalimat yang mengisi berita merupakan pernyataan dari narasumber langsung, yang berkaitan dengan cara pandang narasumber terhadap peristiwa tersebut. Berikut ini salah satu pernyataan yang dikemukakan oleh narasumber.

“SBY ingin menunjukkan bahwa ia ingin memperbaiki kinerja pemerintahan dengan membuat kabinetnya lebih sigap dan tangkas. Namun, yang dilakukan adalah membikin pemerintahan makin tambun.” (kompas.com, 19/10/2011).

Kutipan di atas menunjukkan narasumber ingin mengkritisi *reshuffle* kabinet yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut narasumber, *reshuffle* yang dilakukan oleh presiden bukan hal yang menguntungkan, namun malah merugikan. Narasumber menganggap bahwa perombakan yang dilakukan hanya akan membuat kabinet makin

tambun dan sulit bergerak, jadi bukan lebih sigap dan tangkas. Hal ini karena menurut narasumber, kabinet justru terlalu penuh oleh para wakil menteri.

Berita ini ditutup dengan kalimat yang berisi pernyataan negatif narasumber terhadap *reshuffle* kabinet yang dilakukan oleh presiden, hal ini berarti narasumber menyimpulkan bahwa pengangkatan menteri dan wakil menteri tersebut adalah suatu hal yang tidak efektif. Dalam berita ini juga tidak disebutkan unsur-unsur 5W+1H yang lengkap. Meskipun berita ini terdiri dari 15 paragraf, sehingga dianggap cukup banyak isinya, namun tidak memuat unsur-unsur kelengkapan berita secara lengkap. Isi berita lebih ditekankan pada unsur apa dan bagaimana, yaitu ketidaksetujuan narasumber terhadap pengangkatan menteri dan wakil menteri serta bagaimana presiden berupaya untuk mematat-matat diri supaya tetap populer di mata publik seperti yang tertera pada kalimat penutup berikut ini.

“Di satu sisi, SBY sangat telaten mengurus legitimasi dirinya dengan mematat-matat diri supaya tetap populer di mata publik dan kompromistis berhadapan dengan partai-partai politik. Sebegitu telatennya sehingga ia abai mengurus efektivitas kepemimpinan dan pemerintahannya. Jika gaya ini berkanjut dalam perjalanan tiga tahun ke depan, sebuah persoalan sangat serius menunggu SBY di ujung pemerintahannya; ia memerintah dalam waktu lama, tetapi tak meninggalkan warisan sistemis penting bagi masa depan Indonesia.” (kompas.com, 19/10/2011).

#### 4) Menhuk dan HAM Diganti untuk Lindungi Lingkaran Korupsi?

(Sabtu, 22 Oktober 2011)

Judul di atas sangat jelas menunjukkan bahwa *reshuffle* kabinet yang dilakukan oleh presiden dimungkinkan untuk menutupi isu korupsi yang terjadi dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Pada bagian *headline* juga mendukung judul berita yang menyatakan bahwa Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono telah mengganti Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dengan politisi Demokrat Amir Sjamsuddin. Selain itu, Amir juga didampingi dengan Wakil Menteri Denny Indrayana yang dulunya menjabat Staf Khusus Presiden (kompas.com, 22/10/2011).

**Skema.** Dalam berita ini, wartawan juga menampilkan latar informasi yang cukup lengkap, yaitu "Sindo Radio, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 Oktober 2011", yang menunjukkan tempat narasumber diwawancarai oleh wartawan. Wartawan memilih menampilkan latar informasi tersebut untuk meyakinkan pembaca bahwa berita yang disampaikan benar-benar hasil wawancara dengan narasumber dan bukan hasil opini wartawan sendiri. Dalam berita ini tidak ditampilkan *lead* karena inti berita sudah terlihat pada bagian *headline*, sehingga kalimat pada paragraf selanjutnya merupakan kalimat yang mendukung pernyataan pada *headline* berita.

Wartawan menampilkan cukup banyak kutipan yang berisi pendapat narasumber, dalam berita ini terdapat tiga narasumber yang memberikan



pendapat berlainan. Narasumber pertama, yaitu Romo Mudji Sutrisno (tokoh agama dan budayawan), yang cenderung memberikan pernyataan negatif terhadap peristiwa pelantikan menteri dan wakil menteri. Narasumber kedua, yaitu Usman Hamid (pemerhati hukum dan aktivis KontraS) juga menyatakan hal yang sama dengan narasumber pertama, bahwa pelantikan menteri dan wakil menteri merupakan sesuatu yang patut disayangkan. Bahkan, narasumber kedua juga menyatakan bahwa lingkaran hitam korupsi yang terlanjur melekat dalam masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono justru semakin ditutupi dengan terpilihnya Amir dan Denny sebagai Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Selanjutnya, narasumber ketiga yaitu Ikhsan Modjo (politisi Partai Demokrat), menentang keras terhadap pernyataan narasumber pertama dan kedua. Narasumber ketiga dalam berita ini merupakan politisi Partai Demokrat yang merupakan partai pengusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tentu saja narasumber ketiga tidak terima dengan pernyataan kedua narasumber yang lain. Narasumber ketiga ini juga memberikan pernyataan positif tentang diangkatnya Amir dan Denny sebagai Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Selain menampilkan pernyataan narasumber, dalam berita ini juga ditampilkan pernyataan wartawan yang meliput berita ini. Wartawan menambahkan jika presiden telah mengganti menteri hukum dan HAM dan mengangkat wakil menteri untuk mendampingi menteri tersebut.

Wakil menteri hukum dan HAM diambil dari staf khusus presiden, bukan dari partai politik tertentu, kutipan pernyataan wartawan selengkapnya sebagai berikut ini.

“Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono telah mengganti Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dengan politisi Demokrat Amir Sjamsuddin. Selain itu, Amir juga didampingi dengan Wakil Menteri Denny Indrayana yang dulunya menjabat Staf Khusus Presiden.” (kompas.com, 22/10/2011).

Pada bagian penutup berita, wartawan menampilkan pernyataan narasumber ketiga, yaitu Ikhsan Modjo yang berharap dengan pemilihan Amir Sjamsuddin dan Denny Indrayana dapat memberikan perubahan yang berarti bagi hukum di Indonesia, termasuk membuat *shock therapy* bagi para koruptor yang telah merugikan rakyat.

**Kelengkapan berita.** Berita sebanyak 8 paragraf ini memuat unsur 5W+1H yang lengkap. Hal ini berarti wartawan memandang bahwa unsur-unsur tersebut penting untuk ditampilkan dalam berita. Meskipun terdapat pro dan kontra dalam berita tersebut, namun pendapat kedua narasumber lebih mendominasi isi berita, yang menyatakan sisi negatif dari pelantikan menteri dan wakil menteri tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa berita ini menampilkan tentang ketidakefektivan pelantikan menteri dan wakil menteri.

Kelengkapan unsur 5W+1H dapat dilihat pada unsur “apa” yang ditampilkan pada *headline* berita, yaitu “Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono telah mengganti Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar

dengan Politisi Demokrat Amir Sjamsuddin. Selain itu, Amir juga didampingi dengan wakil menteri Denny Indrayana yang dulunya menjabat Staf Khusus Presiden.” Unsur ”siapa” yang dibicarakan adalah Patrialis Akbar sebagai calon menteri baru dan Denny Indrayana sebagai calon wakil menteri untuk mendampingi Patrialis Akbar. Kemudian, unsur ”oleh siapa” kedua tokoh tersebut dibicarakan, yaitu oleh Romo Mudji Sutrisno sebagai tokoh agama dan budayawan, Usman Hamid sebagai aktivis Kontras dan Ikhsan Modjo sebagai politisi Partai Demokrat. Unsur ”mengapa” dalam berita ini, yaitu merupakan pendapat Usman Hamid yang menyatakan bahwa ”lingkaran hitam korupsi yang terlanjur melekat dalam pemerintahan SBY justru semakin tertutupi dengan terpilihnya Amir dan Denny.”

Selanjutnya unsur ”kapan” dan ”di mana” narasumber membicarakan tentang calon menteri dan calon wakil menteri, yaitu Sabtu (22/10/2011) di Polemik Sindo Radio, Cikini, Jakarta Pusat. Unsur ”bagaimana” dalam berita ini dapat dilihat pada pernyataan Usman Hamid, yaitu ”apakah dengan pergantian di Kemenkumham akan ada perbaikan? Itu tidak jelas. Jangan sampai justru menutup jalan penyelesaian kasus korupsi. Kita harus terus mengawasi itu.”

##### **5) Gertak Sambal (Minggu, 23/10/2011)**

**Skema.** Berita yang berjudul Gertak Sambal tersebut tidak memiliki *headline* dan *lead*. Paragraf pertama berita ini langsung menampilkan

pernyataan wartawan yang berisi tentang sikap Sekretaris Fraksi PKS DPR Abdul Hakim yang menyatakan bahwa tidak mudah untuk keluar dari koalisi, meskipun PKS telah dikecewakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemegang kendali partai koalisi. Berita ini menceritakan tentang sikap PKS yang ingin keluar dari partai koalisi, jika salah satu menteri yang berasal dari PKS diberhentikan dari jajaran kabinet, sehingga wartawan memberi judul berita ini dengan “Gertak Sambal”.

Terdapat dua latar informasi yang ditampilkan oleh wartawan, yaitu “Minggu, 23 Oktober 2011” yang mendukung pernyataan narasumber yang diwawancarai oleh wartawan, yaitu Abdul Hakim sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPR. Selain itu, terdapat latar informasi, yaitu “4 menteri” yang mendukung pernyataan narasumber bahwa 4 menteri dari PKS merupakan jatah yang mutlak harus diberikan menurut kesepakatan antara PKS dengan Susilo Bambang Yudhoyono.

Wartawan juga menampilkan kutipan pendapat narasumber dalam berita ini, yaitu tentang sikap PKS terhadap *reshuffle* kabinet. Wartawan menganggap sikap ini perlu diberitakan karena saat isu *reshuffle* berhembus, banyak petinggi PKS yang angkat bicara, bahkan ada yang menyatakan jika ada salah seorang menteri dari PKS yang dikeluarkan dari kabinet, maka PKS mengancam akan keluar dari koalisi. Hal ini seperti yang terlihat pada pernyataan wartawan sebagai berikut ini.

“Dan (ini yang sangat penting) ada pernyataan keras dari salah satu kader PKS yang dinilai banyak pihak bernada mengancam akan keluar dari koalisi jika salah satu kadernya dicopot dari kabinet. Istilah ini dikenal dengan sebutan TIJITIBEH (mati siji mati kabeh).” (kompas.com, 23/10/2011).

Selain menampilkan pernyataan wartawan, dalam berita ini juga ditampilkan kutipan dari narasumber, yang salah satunya berisi tentang pertimbangan PKS untuk keluar dari koalisi, bukan merupakan hal yang mudah dan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan kader dan internal PKS saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan bangsa dan negara. Hal ini tampak pada kutipan sebagai berikut ini.

“Pertimbangan kami bukan saja pertimbangan kepentingan kader dan internal, tetapi seluruh dinamika pasca *reshuffle* baik sosial, ekonomi, politik dan keamanan yang terjadi pada bangsa dan negara, harus sungguh-sungguh kami cermati, kami tidak ingin terjadi anarkisme dan kekacauan masa transisi demokrasi yang sedang kita bangun secara konstitusional porak poranda di tengah jalan.” (kompas.com, 23/10/2011).

Dalam berita ini, wartawan menggunakan penutup yang berupa kalimat pernyataan dari wartawan sendiri yang menyimpulkan sikap PKS dalam bermanuver politik menghadapi isu *reshuffle* kabinet. Kata-kata yang terlanjur diungkapkan oleh para petinggi PKS menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu masyarakat ketika *reshuffle* kabinet benar-benar dilaksanakan, apakah PKS akan menepati ucapannya atau hanya gertak sambal saja, seperti dalam judul berita ini.

**Kelengkapan berita.** Berita yang terdiri dari 6 paragraf ini tidak memuat unsur 5W+1H secara lengkap. Wartawan sengaja tidak memasukkan semua unsur-unsur tersebut ke dalam berita, hanya sebagian saja yang ditampilkan, misalnya waktu atau “kapan” narasumber diwawancarai, yaitu Minggu (23/10/2011). Alasan wartawan tidak menampilkan seluruh unsur-unsur tersebut karena berita lebih ditekankan kepada isi pernyataan narasumber, dengan sedikit mengabaikan unsur 5W+1H. Berdasarkan kutipan hasil wawancara dengan narasumber serta pernyataan dari wartawan, maka dapat disimpulkan bahwa berita ini mengungkapkan ketidakefektifan pelantikan menteri dan wakil menteri.

**6) Perombakan Kabinet, Kabinet Baru tak Cerminkan Harapan Rakyat (Selasa, 25/10/2011)**

Dilihat dari judul yang terpampang pada awal berita, telah terlihat bahwa isi berita kurang lebih berisi tentang sisi negatif *reshuffle* kabinet, yaitu pengangkatan menteri baru dan wakil menteri. Selanjutnya, pada bagian **skema**, yaitu *headline* mendukung judul berita tentang sisi negatif *reshuffle* kabinet. *Headline* berita ini menyatakan bahwa perombakan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai berlawanan dengan harapan rakyat. Perombakan kabinet tersebut hanya membuat sistem kabinet bertambah gemuk dengan daya sedot anggaran yang besar bagi para elite dan tidak

untuk rakyat. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Laode Ida dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (25/10/2011).

Dalam berita ini tidak ditemukan *lead*, karena inti berita telah ada pada *headline*, sehingga kalimat pada paragraf berikutnya berfungsi untuk mendukung kalimat pada bagian *headline*. Wartawan sengaja menampilkan inti berita pada bagian *headline* dengan maksud agar pembaca dapat langsung mengetahui inti berita yang ingin disampaikan wartawan. Selain itu, kata-kata dalam *headline* dibuat sedemikian rupa agar menarik minat pembaca untuk mengetahui informasi pada paragraf selanjutnya, dengan menggunakan kalimat yang runtut serta berkesinambungan diharapkan pembaca akan membaca berita dari awal sampai akhir berita.

Wartawan menggunakan latar informasi untuk menyampaikan berita dengan lebih mendetail, selain itu penggunaan latar informasi juga memperkuat inti berita. Latar informasi yang dimaksud adalah “Selasa (25/10/2011) di Jakarta”. Latar informasi tersebut menjelaskan waktu wartawan mewawancarai narasumber, yaitu Laode Ida (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah). Selanjutnya, berita ini juga memuat kutipan pendapat narasumber yang diwawancarai. Keseluruhan kutipan tersebut berisi tentang pernyataan negatif narasumber tentang *reshuffle* kabinet. Dalam berita ini juga tidak ditampilkan pernyataan dari wartawan untuk mengomentari pendapat narasumber. Keseluruhan isi berita hanya

memuat pendapat narasumber. Hal ini dimungkinkan karena wartawan ingin menampilkan pendapat narasumber secara utuh tanpa dipengaruhi oleh pendapat wartawan. Berikut ini salah satu kutipan pendapat narasumber.

“Meskipun tidak semuanya, sampai saat ini masih ada pengangkatan menteri yang tidak sesuai dengan bidangnya. Itu artinya profesionalisme itu tidak dijadikan pertimbangan dalam *reshuffle* (perombakan kabinet) ini. Kabinet masih jauh dari nilai-nilai yang diharapkan rakyat. Meskipun ada, itu hanya di beberapa bidang tertentu.” (kompas.com, 25/10/2011).

Pada bagian penutup, wartawan juga menampilkan pendapat narasumber yang menyimpulkan bahwa sejak masa kemerdekaan, hanya Kabinet Juanda yang merupakan Zeken Kabinet profesional, namun kabinet ini juga tidak bertahan lama karena praktik “bagi-bagi rezeki” masih sulit dihilangkan. Kalimat penutup dalam berita sengaja ditampilkan bukan dalam bentuk pernyataan wartawan agar pembaca dapat melihat bahwa berita ini benar-benar memuat sisi negatif dari *reshuffle* kabinet. Wartawan mendukung pernyataan narasumber dengan menampilkan pendapat narasumber secara lengkap dan terperinci.

**Kelengkapan berita.** Dalam berita ini memuat unsur-unsur 5W+1H yang lengkap. Kelengkapan unsur-unsur tersebut antara lain, untuk unsur “apa” dapat dilihat pada bagian *headline* yang menyatakan bahwa “perombakan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai berlawanan dengan harapan



rakyat. Perombakan kabinet tersebut hanya membuat sistem kabinet bertambah gemuk dengan daya sedot anggaran yang besar bagi para elite dan tidak untuk rakyat.” Unsur ”siapa” yang dibicarakan adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian unsur ”oleh siapa” dibicarakan, yaitu oleh narasumber berita, Laode Ida sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah dengan unsur ”kapan”, yaitu Selasa (25/10/2011) serta unsur ”di mana”, yaitu di Jakarta.

Selanjutnya unsur ”mengapa” dapat dilihat pada bagian isi berita, yang juga merupakan pendapat Laode Ida, yaitu ”dengan adanya wakil menteri yang harus bekerjasama dengan menteri, hal itu pasti akan membuat anggaran negara kian tersedot ke atas, bukan ke bawah. Padahal, harapan rakyat saat ini, paling tidak, posisi kementerian bisa lebih profesional dan terarah dalam menjalankan agenda untuk rakyat.” Sedangkan unsur ”bagaimana” juga dapat dilihat pada isi berita yang merupakan pendapat narasumber Laode Ida, yaitu ”dengan waktu satu setengah tahun efektif di sisa tiga tahun pemerintahannya, kondisi itu akan menjadikan pekerjaan yang berat bagi para menteri dan wakil menteri pasca perombakan. Sisa satu setengah tahun ke depan, diprediksi banyak manuver dari partai-partai politik menyambut Pemilu 2014.”

Wartawan sengaja menampilkan unsur-unsur tersebut secara lengkap agar berita yang disampaikan dapat menarik perhatian pembaca, karena dengan unsur-unsur tersebut berita yang disajikan terlihat

lengkap, runtut dan tidak terpotong-potong. Selain itu, berdasarkan pendapat narasumber yang disajikan oleh wartawan dalam berita ini, terlihat bahwa peristiwa pelantikan menteri dan wakil menteri merupakan hal yang tidak efektif.

## 2. Detikcom

### Frame: Pelantikan Wakil Menteri Dinilai Efektif

#### 1) Jelang Reshuffle, SBY Minta Menteri Tak Buat Kebijakan Strategis (Rabu, 12 Oktober 2011)

**Skema.** Berita yang disajikan oleh detikcom pada peristiwa *reshuffle* kabinet diawali dengan *headline* yang mendukung judul berita, *Headline* yang ditampilkan, yaitu Sekjen DPR mendapatkan Surat dari Mensesneg Sudi Silalahi. Dalam Surat itu, menteri-menteri dilarang membuat kebijakan strategis sampai ada penunjukan menteri baru (detikcom, 12/10/2011). *Headline* tersebut memberitakan bahwa presiden benar-benar akan melakukan *reshuffle* kabinet, dan bukan hanya isu belaka. Inti berita telah dapat diketahui pada bagian *headline*, sehingga kalimat pada paragraf selanjutnya merupakan kalimat yang mendukung *headline*. Wartawan sengaja meletakkan ini berita pada bagian *headline* dengan maksud agar dengan sekilas melihat, pembaca segera mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh wartawan. Faktor *headline* juga yang menyebabkan berita ini tidak memiliki *lead*. *Lead*

sebagai kalimat pengantar dipandang tidak perlu ditampilkan karena inti berita sudah terdapat di awal berita.

Latar informasi yang ditampilkan dalam berita ini hanya satu, yaitu "Rabu (12/10/2011)". Latar informasi tersebut menunjukkan waktu wawancara mewawancarai narasumber, yaitu Marzuki Alie (Ketua DPR). Wartawan tidak menampilkan latar informasi dalam jumlah banyak dengan alasan lebih mementingkan pendapat dari narasumber sehingga nyaris mengabaikan latar informasi. Selain itu, wartawan menampilkan kutipan pendapat dari narasumber cukup banyak, salah satunya berisi tentang surat edaran dari Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, tentang larangan bagi para menteri untuk bepergian jauh dan larangan untuk keluar negeri. Hal ini karena dalam waktu yang tidak lama lagi, presiden akan memanggil para menteri tersebut. Kutipan pendapat narasumber selengkapnya sebagai berikut ini.

"Kemungkinan Sabtu dan Minggu, *reshuffle* sudah hampir pasti seluruhnya. Kita para menteri sudah dikontak Mensesneg untuk tidak bepergian jauh apalagi ke luar negeri." (detikcom, 12/10/2011).

Dalam berita ini, ditampilkan pernyataan wartawan untuk mengomentari pendapat narasumber. Pernyataan tersebut ditampilkan untuk mendukung atau memperkuat pendapat dari narasumber dan juga untuk menyimpulkan pendapat narasumber. Pernyataan yang ditampilkan oleh narasumber berupa pendapat wartawan, dalam berita ini berisi tentang keberadaan surat dari Mensesneg yang tidak ditujukan

kepada DPR, tetapi ditujukan kepada Sekjen DPR. Berikut ini salah satu kutipan pernyataan dari wartawan.

Dalam surat itu tidak dijelaskan kapan penunjukan menteri baru akan dilakukan. Surat itupun tidak ditujukan kepada DPR tetapi Sekjen DPR, karena Sekjen DPR masih dibawah Setneg. (detikcom, 12/10/2011).

Pada bagian penutup berita, juga ditampilkan pendapat dari wartawan, yang berisi tentang nama-nama yang disebut-sebut akan menempati posisi menteri dan wakil menteri. Berikut ini kutipan pernyataan wartawan pada bagian penutup berita.

“Jelang *reshuffle* sejumlah nama yang disebut akan menempati posisi menteri menggantikan menteri yang lama kian beredar. Sejumlah nama yang disebut-sebut yakni Kepala BKPM Gita Wiryawan, Dirut Pertamina Karen Agustiawan, Wakil Ketua Umum Golkar Sharif Cicip, dan Ketua Umum Federasi SPSI Niaga Andi Gani Nena Wea.” (detikcom, 12/10/2011).

**Kelengkapan berita.** Unsur-unsur 5W+1H dalam berita juga tidak lengkap. Wartawan sengaja hanya menampilkan sebagian dari unsur-unsur tersebut agar dapat menonjolkan unsur yang lain, jika semua unsur ditampilkan, maka unsur yang akan ditonjolkan tidak akan terlihat. Unsur yang disembunyikan adalah unsur “where” atau “di mana”, sedangkan unsur yang ditonjolkan adalah unsur “what” atau “apa” dan “how” atau “bagaimana”.

Unsur “what” atau “apa” dalam berita ini, yaitu “dalam surat itu, menteri-menteri dilarang membuat kebijakan strategis sampai ada penunjukan menteri baru.” Kemudian unsur “mengapa” sebenarnya

juga sudah terjawab pada pernyataan di atas, yaitu Presiden SBY akan mengadakan reshuffle kabinet dengan menunjuk beberapa menteri baru. Unsur "siapa" yang dibicarakan, yaitu para menteri, sedangkan unsur "oleh siapa" dibicarakan, yaitu Nining Indra Saleh sebagai Sekjen DPR. Unsur "bagaimana" dalam berita ini, yaitu "seperti diketahui, *reshuffle* menteri tidak akan lama lagi dilakukan. Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad sudah dikabari Mensesneg Sudi Silalahi terkait kepastian *reshuffle* kabinet. *Reshuffle* akan diputuskan akhir pekan ini."

Berita ini memang tidak secara jelas mendukung atau tidak mendukung pelantikan menteri dan wakil menteri, namun karena tidak terdapat pernyataan negatif baik dari narasumber maupun wartawan, maka dapat dinyatakan bahwa berita ini memuat keefektivan pelantikan menteri dan wakil menteri.

## 2) Inilah Pidato Lengkap di Cikeas Jelang *Reshuffle* (Kamis, 13 Oktober 2011)

**Skema.** Pada salah satu bagian skema, yaitu *headline*, wartawan menuliskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hasil pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai koalisi menjelang pengumuman *reshuffle* kabinet beberapa hari mendatang. Ada 8 poin yang disampaikan SBY (detikcom, 13/10/2011). *Headline* di atas berfungsi memperjelas judul yang dibuat oleh wartawan dalam

menyampaikan berita. *Headline* tersebut memberitakan kepada pembaca bahwa presiden baru saja mengadakan pertemuan dengan ketua partai koalisi untuk membahas masalah *reshuffle* kabinet yang dilakukan oleh presiden.

Selanjutnya sebelum menuju ke isi berita mengenai isi pidato presiden yang disampaikan di kediamannya di Puri Cikeas, dalam berita ini juga ditampilkan *lead* berita. *Lead* tersebut berupa pernyataan presiden sebagai berikut ini.

“Berikut pidato lengkap Presiden SBY yang disampaikan di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Kamis (13/10/2011).” (detikcom, 13/10/2011).

Latar informasi yang ditampilkan dalam berita ini adalah “Puri Cikeas, Bogor, Kamis (13/10/2011)”, menunjukkan waktu dan tempat presiden mengumumkan hasil pertemuannya dengan sejumlah ketua umum partai koalisi. Berita ini menampilkan isi pidato presiden, sehingga semua hal yang diberitakan merupakan kutipan pernyataan presiden atau dalam berita ini disebut kutipan dari narasumber. Salah satu kutipan dari narasumber dalam berita ini yaitu sebagai berikut ini.

“Pertemuan ini, saya pandang perlu untuk dilakukan agar saya bisa menjelaskan kepada pimpinan banyak parpol terkait penataan kabinet atau *reshuffle* yang sedang saya godok dan finalkan, meskipun pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah wewenang presiden sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD. Saya pandang perlu memberikan penjelasan kepada jajaran koalisi, tentang tujuan, sasaran dilakukannya *reshuffle* kabinet.” (detikcom, 13/10/2011).

Dalam berita ini juga ditampilkan kalimat penutup yang berupa pernyataan presiden atau masih ada kaitannya dengan pidato presiden. Kalimat penutup tersebut berisi tentang pekerjaan presiden masih berlanjut terus dalam beberapa hari mendatang dan presiden juga mengatakan jika terdapat pergantian kabinet maka akan dikonsultasikan terlebih dahulu.

**Kelengkapan berita.** Dalam berita ini ditampilkan unsur 5W+1H secara lengkap. Unsur "apa" dalam berita ini seperti dalam berita-berita sebelumnya terletak pada bagian *headline*, yaitu "Presiden SBY menyampaikan hasil pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai koalisi menjelang pengumuman reshuffle kabinet beberapa hari mendatang. Ada 8 poin yang disampaikan Presiden SBY." Unsur "mengapa" dalam berita ini merupakan pernyataan Presiden SBY dalam pidatonya, yaitu "pertemuan ini, saya pandang perlu untuk dilakukan agar saya bisa menjelaskan kepada pimpinan parpol terkait penataan kabinet atau reshuffle yang sedang saya godok dan finalkan meskipun pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah wewenang presiden sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD. Saya pandang perlu memberikan penjelasan kepada jajaran koalisi, tentang tujuan, sasaran dilakukannya *reshuffle* kabinet." Sedangkan unsur "bagaimana" dapat dilihat melalui pernyataan Presiden SBY, yaitu "dalam pertemuan tadi, saya menjelaskan tentang tujuan, sasaran, latar belakang dari *reshuffle*."

Saya minta pandangan, pemikiran parpol secara umum agar pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II, pasca *reshuffle* bisa lebih efektif.”

Selanjutnya unsur ”siapa” yang dibicarakan, tentu saja Presiden SBY. Unsur ”oleh siapa” dibicarakan, yaitu oleh wartawan sendiri karena wartawan tidak memunculkan narasumber berita. Unsur ”kapan” dalam berita ini, yaitu Kamis (13/10/2011) dengan unsur ”di mana”, yaitu di kediaman Presiden SBY, Puri Cikeas, Bogor.

Unsur-unsur tersebut dimunculkan oleh wartawan agar pembaca mengetahui dengan jelas berita yang disampaikannya. Unsur-unsur apa, siapa, kapan, di mana, oleh siapa dan bagaimana tentu saja akan ditemukan dalam berita sebanyak 12 paragraf tersebut. Tanpa adanya unsur-unsur tersebut, berita sepanjang itu tidak akan dapat memberitakan apa-apa kepada pembaca. Berita tersebut lebih banyak berisi tentang pendapat dan pernyataan presiden dalam pidato yang dilakukannya. Oleh karena itu, jelas bahwa isi berita menunjukkan keefektivan pengangkatan wakil menteri.

### **3) Posisi Calon Menteri dan Wamen Masih Bisa Disesuaikan (Sabtu, 15 Oktober 2011)**

**Skema.** Pada salah satu bagian skema, yaitu *headline* dalam berita ini memuat tentang pernyataan wartawan yang menyatakan bahwa tiga hari sesi audisi *reshuffle* KIB II berlangsung, menghasilkan 4 calon wakil



menteri. Polemik yang berlangsung mengenai posisi itu, menjadi masukan pertimbangan Presiden SBY untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut (detikcom, 15/10/2011). Untuk mendukung pernyataan wartawan tersebut, ditampilkan sebuah *lead* yang berisi tentang pernyataan juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha yang selanjutnya disebut narasumber berita ini. Sebagai pengantar sebelum masuk ke bagian isi, *lead* dalam berita ini berisi tentang keinginan presiden untuk mendapatkan sosok yang terbaik dari yang terbaik dalam kabinetnya. Selain itu, presiden juga menginginkan orang yang tepat ditempatkan pada tempat yang tepat pula.

Latar informasi yang disampaikan oleh wartawan yaitu “Jakarta, Sabtu, 15 Oktober 2011” yang berfungsi untuk menjelaskan waktu narasumber diwawancarai oleh wartawan. Latar informasi dalam berita ini hanya sedikit karena wartawan ingin agar pembaca mengetahui bagian-bagian yang penting saja dari berita ini, sehingga nyaris mengabaikan bagian detail dari berita ini.

Dalam berita ini ditampilkan beberapa kutipan pendapat dari juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha yang salah satunya menyatakan bahwa sebelum para menteri dan wakil menteri dilantik, maka terlebih dahulu diadakan pemilihan dan audisi sehingga masih dimungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian oleh presiden. Hal ini karena presiden

ingin mendapatkan menteri dan wakil menteri yang terbaik dari yang terbaik. Kutipan selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut ini.

“Masih terbuka kemungkinan ada penyesuaian lebih lanjut sampai yang bersangkutan resmi dilantik kelak,” (detikcom, 15/10/2011).

Kutipan lain dalam berita ini, yaitu berisi tentang pembahasan pemilihan menteri baru dan wakil menteri yang dilakukan oleh presiden bersama wakil presiden untuk mendapatkan hasil yang benar-benar sesuai dan tepat menurut presiden. Dalam pembahasan tersebut juga dihadiri Mendiknas dan Menbudpar dalam pertemuan yang berlangsung hingga hampir tengah malam. Berikut ini kutipan selengkapnya.

“Kemarin pembahasan antara Pak Presiden dengan Pak Wapres bersama Pak M Nuh (Mendiknas) dan Pak Jero Wacik (Menbudpar) baru selesai tengah malam.” (detikcom, 15/10/2011).

Selain itu, dalam berita ini juga berisi pernyataan wartawan untuk memperkuat pendapat narasumber yang telah diberitakan sebelumnya. Pernyataan wartawan tersebut antara lain tentang audisi calon wakil menteri yang akan dipilih oleh presiden, semuanya tidak berasal dari partai politik, namun dari pejabat karir kementerian yang telah mengetahui seluk beluk dan pekerjaan teknis di kementerian.

Kalimat penutup dalam berita ini bukan merupakan kesimpulan dari isi berita, namun dibiarkan oleh wartawan dalam bentuk kutipan pendapat narasumber. Hal ini karena wartawan menginginkan kalimat penutup yang berbeda dari berita-berita yang lain, wartawan mengajak pembaca menyimpulkan sendiri berita yang telah dibacanya. Kesimpulan

wartawan justru ada pada paragraf sebelum kalimat penutup. Wartawan sengaja menggunakan kutipan pendapat sebagai kalimat penutup sebagai kalimat pendukung untuk paragraf sebelumnya.

**Kelengkapan berita.** Wartawan menampilkan unsur-unsur 5W+1H dalam berita ini secara lengkap. Wartawan ingin agar pembaca tidak hanya membaca berita sepotong-sepotong saja, namun wartawan ingin agar pembaca mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh wartawan secara lengkap, sehingga wartawan menampilkan semua unsur 5W+1H dalam berita ini.

Unsur "apa" dalam berita ini, yaitu "Tiga hari sesi audisi *reshuffle* KIB II berlangsung, menghasilkan 4 calon wakil menteri. Polemik yang berlangsung mengenai posisi itu, menjadi masukan pertimbangan Presiden SBY untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut." Kemudian unsur "mengapa" dalam berita ini merupakan pernyataan narasumber berita, yaitu "Presiden SBY ingin mendapat sosok yang terbaik. Bukan hanya itu, tapi juga harus ditempatkan pada posisi yang tepat dan pada waktu yang tepat." Sedangkan unsur "bagaimana" dapat dilihat, yaitu "empat orang calon wakil menteri yang telah mengikuti audisi, tidak ada yang berasal dari partai politik. Mereka adalah pejabat karir yang sudah tahu benar teknis di kementeriannya dan kalangan akademisi independen." Selain itu, unsur "siapa" yang dibicarakan, yaitu Presiden SBY, "oleh siapa" dibicarakan, yaitu oleh narasumber berita, yaitu Juru

bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha. Unsur "kapan", yaitu Sabtu (15/10/2011) pagi hari dengan unsur "di mana", yaitu di Jakarta.

Dalam berita ini, tidak ditemukan pernyataan negatif atau tidak mendukung pengangkatan menteri dan wakil menteri, baik dari pernyataan narasumber maupun dari wartawan. Oleh karena itu, berita ini termasuk berita yang menyampaikan keefektivan pelantikan menteri dan wakil menteri.

#### **4) Presiden Harus Perhatikan Aturan Pengangkatan Wakil Menteri (Minggu, 16 Oktober 2011).**

**Skema.** Pada salah satu bagian skema, yaitu *headline* tertera bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memilih 13 orang menjadi wakil menteri. Aturan pengangkatan seseorang menjadi wakil menteri jelas diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Jangan sampai mereka yang sudah dipilih, justru gagal karena terbentur oleh regulasi (detikcom, 16/10/2011).

Wartawan sengaja menampilkan *headline* tersebut sebagai inti dari berita yang disampaikannya. Wartawan memandang bahwa pembaca perlu mengetahui secara langsung inti berita yang disampaikannya tanpa harus mencari terlalu lama. Dengan menampilkan inti berita secara langsung di bagian *headline*, maka kalimat-kalimat pada paragraf selanjutnya merupakan kalimat pendukung *headline*. Demikian pula dalam berita ini tidak terdapat *lead*, wartawan tidak memandang perlu

sebuah kalimat pengantar karena inti berita dapat langsung terbaca pada bagian *headline*.

Latar informasi yang disampaikan oleh wartawan dalam berita ini, yaitu “Minggu, 16 Oktober 2011”. Latar informasi tersebut memberitakan kepada pembaca mengenai waktu wartawan mewawancarai narasumber. Narasumber dalam berita ini adalah Prof. Hikmahanto Juwana (Guru Besar fakultas Hukum UI). Wartawan dalam menyajikan beritanya juga menampilkan kutipan pendapat dari narasumber yang mempertanyakan apakah calon menteri yang akan dipilih oleh presiden telah memenuhi syarat, yaitu telah menduduki jabatan struktural eselon 1/a ataukah belum. Kutipan selengkapnya adalah sebagai berikut ini.

“Menjadi pertanyaan apakah para calon Wamen yang berasal dari perguruan tinggi telah memegang jabatan struktural I/a di kementerian dimana yang bersangkutan diangkat. Seharusnya Setneg mengingatkan Presiden terkait dengan persyaratan ini,” (detikcom, 16/10/2011).

Selanjutnya, wartawan juga memberikan pernyataan untuk memperkuat dan menyimpulkan pernyataan dari narasumber berita. Pernyataan yang ditampilkan oleh wartawan yang menyimpulkan pernyataan narasumber, dengan menyatakan bahwa menurut Hikmahanto, presiden telah menunjuk 13 wakil menteri dengan latar belakang yang berbeda. Hikmahanto juga mengingatkan bahwa pemilihan wakil menteri tersebut juga harus memenuhi Undang-Undang

Kementerian Negara, agar para wakil menteri yang telah dipilih tersebut gagal dilantik karena terbentur peraturan. Berikut ini kesimpulan wartawan terhadap pendapat narasumber.

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menunjuk 13 orang menjadi Wakil Menteri. Aturan pengangkatan seseorang menjadi Wakil Menteri jelas diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Jangan sampai mereka yang sudah dipilih, justru gagal karena terbentur oleh regulasi.” (detikcom, 16/10/2011).

Bagian penutup pada berita ini juga bukan dalam bentuk kesimpulan dari wartawan, tetapi berupa kalimat kutipan pendapat narasumber. Pembaca diajak lebih kritis dalam membaca berita, tidak hanya berharap membaca kesimpulan dari wartawan, tetapi pembaca disuruh menyimpulkan sendiri dari kalimat demi kalimat yang telah dibaca.

**Kelengkapan berita.** Unsur-unsur 5W+1H dalam berita ini disusun dengan lengkap oleh wartawan. Unsur ”apa” dalam berita ini , yaitu ”Presiden SBY sudah menunjuk 13 orang menjadi wakil menteri. Aturan pengangkatan seseorang menjadi wakil menteri jelas diatur dalam UU Kementerian Negara. Jangan sampai mereka yang sudah dipilih, justru gagal karena terbentur oleh regulasi.” Unsur ”mengapa” dalam berita ini merupakan pernyataan dari narasumber berita, yaitu ”berdasarkan penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara disebutkan bahwa jabatan wakil menteri harus berasal dari pejabat karir. Ketentuan ini selanjutnya dirinci dalam Pasal 70 ayat (3) Perpres 47/2009 yang

menyebutkan pejabat karir adalah pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon I/a. Sedangkan unsur "bagaimana" dalam berita ini juga merupakan pernyataan narasumber yaitu "menjadi pertanyaan apakah para calon wakil menteri yang berasal dari perguruan tinggi telah memegang jabatan struktural I/a di kementerian dimana yang bersangkutan diangkat. Seharusnya Setneg mengingatkan presiden terkait dengan persyaratan ini. "

Selanjutnya unsur "siapa" dalam berita ini, yaitu Presiden SBY dengan unsur "oleh siapa" dibicarakan, yaitu oleh narasumber berita, Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Fakultas Universitas Indonesia. Unsur "kapan", yaitu Minggu (16/10/2011) dengan unsur "di mana", yaitu di Jakarta.

Unsur-unsur 5W+1H tersebut dianggap penting untuk ditampilkan oleh wartawan, sehingga kronologis peristiwa yang disampaikan oleh watawan dapat dibaca oleh pembaca secara lengkap. Pada berita ini, tidak terdapat pernyataan negatif dari narasumber ataupun wartawan. Pernyataan yang tertulis hanya mengingatkan presiden agar berhati-hati dalam memilih wakil menteri dan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, berita ini dianggap memuat keefektivan pelantikan menteri dan wakil menteri.

**5) Ibas: Pengangkatan Wakil Menteri untuk Mempercepat Pembangunan (Minggu, 16 Oktober 2011)**

Judul di atas telah menunjukkan bahwa berita yang akan disampaikan mendukung pengangkatan wakil menteri oleh presiden. Pada salah satu bagian skema, yaitu *lead* berisi pemberitaan wartawan yang mengemukakan tentang pendapat Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyambut penunjukan sejumlah wakil menteri oleh presiden yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan (detikcom, 16/10/2011).

Menurut wartawan, berita ini tidak memerlukan *lead* karena inti berita telah tampak pada bagian *headline*. Latar informasi yang ditampilkan dalam berita ini juga hanya satu, yaitu "Minggu, 16 Oktober 2011" yang memberikan pelengkap informasi pada pernyataan narasumber, yaitu Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas). Latar informasi dalam berita ini memberikan detil berita yang disampaikan oleh wartawan. Wartawan ingin agar pembaca dapat mengetahui berita seutuhnya tanpa ada bagian yang dihilangkan, jika ada bagian yang disembunyikan adalah semata-mata karena wartawan ingin pembaca mengetahui pemikiran dan cara pandang wartawan terhadap berita yang disampaikannya.

Dalam berita ini juga ditampilkan kutipan pendapat dari narasumber. Salah satu kutipan yang ditampilkan adalah mengenai pendapat Ibas yang menyambut baik pemilihan wakil-wakil menteri di



kementerian strategis yang dipilih oleh presiden. Menurut Ibas, kehadiran para wakil menteri akan mempercepat akselerasi pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah (detikcom, 16/10/2011). Kutipan lain dalam berita ini juga masih mengenai pendapat Ibas, yaitu Ibas berharap kinerja pada masing-masing kementerian ke depan mampu menjangkau seluruh wilayah NKRI yang luas, yang akan berdampak pada pemerataan pembangunan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Ibas juga berharap bahwa program-program pemerintah dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan (detikcom, 16/10/2011).

Selanjutnya, dalam berita ini tidak ditampilkan pernyataan wartawan. Pada bagian penutup, wartawan menampilkan daftar para calon wakil menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan harapan pembaca mengetahui informasi terkini yang sedang hangat dibicarakan. Wartawan menganggap perlu menampilkan daftar tersebut untuk menarik minat pembaca agar mau membaca sampai akhir berita yang disampaikan.

**Kelengkapan berita.** Unsur-unsur 5W+1H dalam berita ini, meliputi unsur "apa" yang terletak pada bagian *headline* berita, yaitu "Sekretaris Jenderal partai demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyambut penunjukan sejumlah wakil menteri oleh Presiden SBY. Menurutnya langkah ini mampu mempercepat pemerataan pembangunan." Kemudian unsur "mengapa" dalam berita ini, yaitu

pernyataan narasumber berita ini, yaitu "saya optimis kehadiran mereka akan mempercepat akselerasi pembangunan yang tengah diupayakan pemerintah." Unsur bagaimana dalam berita ini juga merupakan pernyataan narasumber, yaitu "harapan saya kinerja masing-masing kementerian KIB II ke depan mampu juga mencapai seluruh wilayah NKRI yang luas. Dengan demikian, pemerataan pembangunan sampai ke pelosok daerah dan program-program pemerintahan hingga berakhirnya masa tugas Presiden SBY dapat dicapai sesuai target."

Selanjutnya unsur "siapa" yang dibicarakan dalam berita ini, yaitu Presiden SBY dengan unsur "oleh siapa" dibicarakan, yaitu oleh Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas). Unsur "kapan" dalam berita ini, yaitu Minggu (16/10/2011) dengan unsur "di mana", yaitu di Jakarta dalam sebuah siaran pers.

Dalam berita yang cukup ringkas ini, wartawan menganggap penting untuk menampilkan unsur 5W+1H agar pembaca dapat mengetahui isi berita secara utuh, tidak hanya mengetahui apa dan siapa yang diberitakan saja, tetapi juga kapan, di mana, oleh siapa dan bagaimana peristiwa pengangkatan wakil menteri dilakukan. Dalam berita ini tidak terdapat pernyataan yang tidak mendukung pengangkatan wakil menteri, sehingga dapat dianggap bahwa berita ini memuat keefektifan pelantikan wakil menteri.

**6) PDIP: Wakil Menteri Sebaiknya dari Pejabat Eselon Satu Kementerian (Senin, 17 Oktober 2011)**

**Skema.** Salah satu bagian skema, yaitu *headline* berita menampilkan pernyataan wartawan yang memberitakan bahwa PDIP meminta presiden memprioritaskan pejabat eselon satu dari kementerian terkait untuk dijadikan wakil menteri. Selain itu, wakil menteri harus menguasai bidangnya, dan telah diatur dalam UU Kementerian Negara (detikcom, 17/10/2011). Pernyataan tersebut mendukung judul yang tertera pada awal berita serta menjelaskan secara lebih rinci judul berita.

Pada bagian *lead*, wartawan menampilkan pendapat narasumber, yaitu Thahyo Kumolo (Sekjen PDIP) yang menjelaskan apabila alasan wakil menteri dipilih karena profesionalisme, maka seharusnya presiden memilih pejabat eselon satu yang dianggap sudah profesional (detikcom, 17/10/2011). *Lead* tersebut mendukung dan memperkuat *headline* berita serta memberikan pengantar ringkas bagi paragraf selanjutnya.

Latar informasi yang ditampilkan dalam berita ini hanya ada satu, yaitu "Senin, 17 Oktober 2011" yang memberikan rincian penjelasan terhadap pernyataan narasumber berita. Latar informasi tersebut menunjukkan waktu terjadinya wawancara antara wartawan dengan narasumber berita. Selanjutnya, dalam berita ini juga ditampilkan kutipan

pernyataan narasumber, salah satunya berisi tentang kekhawatiran narasumber terhadap pengangkatan wakil menteri akan dapat memberikan keuntungan bagi kinerja kementerian dan manfaat bagi masyarakat atau tidak. Jika tidak dapat memberikan keuntungan dan manfaat, maka kasihan presiden yang melakukannya. Selain itu wartawan juga mengutip tentang pertanyaan narasumber, para calon wakil menteri berasal dari perguruan tinggi yang telah memegang jabatan struktural I/a ataukah belum. Seharusnya Sekretaris Negara mengingatkan presiden terkait dengan persyaratan tersebut (detikcom, 17/10/2011).

Wartawan juga memberikan pernyataan sendiri mengenai pengangkatan wakil menteri tersebut. Menurut wartawan, presiden yang sudah menunjuk 13 wakil menteri seharusnya mempertimbangkan peraturan yang ada, yaitu UU Kementerian Negara agar para calon wakil yang telah dipilih tidak terhalang oleh regulasi nantinya. Pernyataan selengkapnya dapat dilihat pada kutipan berikut ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menunjuk 13 orang menjadi Wakil Menteri. Aturan pengangkatan seseorang menjadi Wakil Menteri jelas diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Jangan sampai mereka yang sudah dipilih, justru gagal karena terbentur oleh regulasi (detikcom, 17/10/2011).

Penutup dalam berita ini sengaja ditampilkan oleh wartawan berupa daftar nama-nama calon wakil menteri yang ditunjuk oleh presiden. Dengan mengetahui nama-nama calon wakil menteri tersebut,

pembaca akan dapat menilai layak atau tidaknya nama-nama tersebut dijadikan wakil menteri oleh presiden.

**Kelengkapan berita.** Unsur-unsur 5W+1H dalam berita ini ditampilkan secara lengkap. Unsur "apa" dalam berita ini, yaitu "PDIP meminta Presiden SBY memprioritaskan pejabat eselon satu dari kementerian terkait untuk dijadikan wakil menteri. Selain wakil menteri sudah menguasai bidangnya, hal tersebut memang harus diatur dalam UU Kementerian Negara." Kemudian unsur "mengapa" dalam berita ini merupakan pendapat narasumber berita, yaitu "narasumber berharap Presiden SBY benar-benar teliti sebelum melantik para wakil menteri. Kalau tidak, bisa jadi pelantikan wakil menteri bukan solusi peningkatan kinerja menteri." Selanjutnya unsur "bagaimana" dalam berita ini, yaitu "Presiden SBY sudah menunjuk 13 orang menjadi wakil menteri. Aturan pengangkatan seseorang menjadi wakil menteri jelas diatur dalam UU Kementerian Negara. Jangan sampai mereka yang sudah dipilih, justru gagal karena terbentur oleh regulasi."

Selain itu, unsur "kapan" dalam berita ini, yaitu Senin (17/10/2011) dengan unsur "di mana", yaitu di Jakarta. Unsur "siapa" yang dibicarakan, yaitu Presiden SBY dengan unsur "oleh siapa", yaitu oleh narasumber berita, Tjahjo Kumolo, Sekjen PDIP.

Wartawan sengaja menampilkan semua unsur di atas agar masyarakat dapat mengetahui isi berita secara keseluruhan bukan hanya

apa yang diberitakan, siapa dan bagaimana, tetapi juga oleh siapa, kapan dan di mana peristiwa yang diberitakan terjadi. Dalam berita ini tidak ditampilkan pernyataan negatif dari narasumber maupun dari wartawan. Dalam berita ini, narasumber hanya memberi saran kepada presiden sehingga dapat dikatakan bahwa dalam berita memuat keefektifan peristiwa pelantikan menteri dan wakil menteri.

**7) PD: Penambahan Wamen Tidak Membuat Gemuk Kabinet (Senin, 17/10/2011)**

Judul di atas seperti telah memberi kesimpulan bahwa pengangkatan wakil menteri tidak membuat gemuk kabinet. Selanjutnya didukung oleh *headline* pada bagian *skema* yang berisi tentang rangkuman pendapat narasumber, yaitu Rachlan Nasidik (Sekretaris Departemen HAM DPP Partai Demokrat). Pada bagian *headline* tersebut, narasumber menyatakan meskipun penambahan wakil menteri sangat disayangkan banyak pihak, namun diyakini tidak akan menambah gemuk kabinet, apalagi pengangkatan wakil menteri juga dilakukan di berbagai negara. (detikcom, 17/10/2011).

Dalam berita ini juga dimunculkan *lead*, yang berupa pengantar ringkas sebelum masuk ke bagian isi. Pada bagian *lead*, wartawan juga menampilkan pendapat narasumber, yaitu sebagai berikut ini.

“Penambahan wamen pada pemerintahan diakui Undang-undang dan tidak menambah gemuk kabinet. Wamen bukan anggota kabinet, melainkan sebagai pejabat karir,” kata Rachlan dalam

jumpa pers di Warung Daun Jl Wolter Monginsidi, Jakarta, Senin (17/10/2011). (detikcom, 17/10/2011).

Pada bagian *lead* berita tersebut sekaligus juga terdapat latar informasi, yaitu “Warung Daun Jl Wolter Monginsidi, Jakarta, Senin (17/10/2011)”. Latar informasi tersebut menjelaskan kepada pembaca waktu dan tempat narasumber diwawancarai oleh wartawan. Dalam berita, ini wartawan juga menampilkan cukup banyak kutipan pendapat narasumber, salah satunya berisi tentang status wakil menteri yang diaktakan bukan anggota kabinet, melainkan pejabat karir yang bergeser tempat. Para wakil menteri merupakan pegawai negeri sipil yang profesional kemudian bekerja di kementerian. Kutipan selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut ini.

“Jadi, mereka hanya bergeser tempat. Dengan kata lain, mereka adalah profesional yang telah berkarir di birokrasi pemerintahan sebelumnya dan menduduki puncak karir.” (detikcom, 17/10/2011).

Dalam berita ini, tidak menampilkan pernyataan wartawan untuk menambahkan atau menyimpulkan pendapat narasumber. Hal ini disengaja oleh wartawan agar berita yang disampaikan tidak terkontaminasi oleh pernyataan wartawan. Pada bagian penutup, wartawan menampilkan kutipan pendapat narasumber yang menyatakan bahwa wakil menteri ditambahkan pada kementerian yang wilayah kerjanya luas, sehingga dengan keberadaan wakil menteri diharapkan

dapat meringankan kerja menteri tersebut. Kutipan kalimat penutup dapat dilihat sebagai berikut ini.

“Mereka ditambahkan pada pos-pos kementerian yang cakupan wilayah kerjanya luas. Sosok para wamen adalah pribadi yang kredibel, profesional, dan mempunyai track record yang baik.”  
Jelas Rachlan. (detikcom, 17/10/2011).

**Kelengkapan berita.** Unsur-unsur 5W+1H dalam berita ini ditampilkan secara lengkap. Unsur “apa” dalam berita ini, yaitu “pengangkatan wakil menteri oleh Presiden SBY tidak akan menambah gemuk kabinet dan merupakan praktik yang biasa dilakukan di banyak negara.” Unsur “mengapa” dalam berita ini, yaitu “wakil menteri bukan anggota kabinet, melainkan sebagai pejabat karir.” Sedangkan unsur “bagaimana dalam berita ini, yaitu “Jadi mereka hanya bergeser tempat. Dengan kata lain, mereka adalah profesional yang telah berkarir di birokrasi pemerintahan sebelumnya dan menduduki puncak karir.”

Selanjutnya, unsur “siapa” yang dibicarakan dalam berita ini, yaitu para wakil menteri yang akan dilantik oleh Presiden SBY. Unsur “oleh siapa” dibicarakan, yaitu oleh narasumber berita, Rachlan Nasidik (Sekretaris Departemen HAM DPP Partai Demokrat). Unsur “kapan” dalam berita ini, yaitu Senin (17/10/2011) dengan unsur “di mana”, yaitu di Warung Daun, Jl. Wolter Monginsidi, Jakarta.

Tampaknya wartawan detikcom, terutama dalam menyampaikan berita ini sengaja untuk menyajikan unsur-unsur 5W+1H sebagai bagian



dari kelengkapan berita. Wartawan tidak mau menampilkan berita setengah-setengah, tetapi wartawan ingin memberitakan sepenuhnya perihal peristiwa pelantikan wakil menteri yang tengah terjadi. Dalam berita ini, narasumber menyampaikan pendapat yang positif berkaitan dengan peristiwa pelantikan wakil menteri, sehingga berita ini dikatakan memuat tentang keefektivan pelantikan wakil menteri.

**8) Sudi: Tidak Ada Bargaining Soal Pergantian Menteri (Selasa, 18/10/2011)**

Judul yang dipilih oleh pembuat berita dengan jelas merupakan bentuk persetujuan bahwa narasumber setuju dengan adanya pelantikan wakil menteri. Judul di atas seperti sebuah petikan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber. Petikan selengkapnya sebagai berikut ini.

“Tidak, tidak ada bargaining-bargaining. Itu kan prerogatif Presiden. Karena di dalam kesepakatan koalisi itu sudah tercantum, Presiden memiliki prerogatif. Adapun hal-hal yang perlu dikonsultasikan, dikonsultasikan.” (detikcom, 18/10/2011).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembuat berita ingin menampilkan sebuah berita yang murni berasal dari narasumber, tanpa penambahan argumen oleh pembuat berita. Selain itu, pemilihan judul dilakukan oleh pembuat berita untuk menarik masyarakat, sehingga dalam sekilas membaca judul langsung tertarik untuk membaca semua isi berita tersebut. Penjelasan lebih lanjut dan menjadi inti dari isi berita adalah bagian **skema** berupa *headline* berita, yaitu pemerintah memastikan tidak ada deal-deal tertentu dalam memutuskan *reshuffle*

kabinet. Semua hasil akhir *headline* merupakan hak prerogatif Presiden. Dari sisi pembuat berita, pemilihan *headline* terkesan ingin memastikan bahwa judul yang disuguhkan dalam media online tersebut benar adanya. Maksudnya pembaca diajak untuk mempercayai bahwa benar-benar tidak ada tawar-menawar dalam proses pelantikan wakil menteri, itu merupakan murni pilihan presiden. Latar informasi dari pemberitaan tersebut sudah cukup jelas ditulis oleh pembuat berita yaitu berupa waktu dan tempat kejadian wawancara tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta. Dalam pemberitaan tersebut, pembuat berita atau wartawan berusaha untuk menyajikan berita sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber. Ini terlihat jelas dalam pemberitaannya, wartawan tidak memberikan pendapatnya tentang pengangkatan wakil menteri oleh presiden.

**Kelengkapan berita.** Unsur-unsur 5W+1H dalam berita ini, meliputi unsur "apa", yaitu "pemerintah memastikan tidak ada deal-deal tertentu dalam memutuskan *reshuffle* kabinet. Semua hasil akhir *reshuffle* merupakan hak prerogatif presiden." Kemudian unsur "mengapa" dalam berita ini merupakan pernyataan dari narasumber berita, yaitu "tidak, tidak ada bargaining-bargaining. Itu kan hak prerogatif presiden. Karena dalam kesepakatan koalisi itu sudah tercantum. Presiden memiliki prerogatif. Adapun hal-hal yang perlu dikonsultasikan, dikonsultasikan."

Selanjutnya, unsur “bagaimana”, yaitu “karena kita ingin tiga tahun ke depan optimal hasilnya. Kita lebih menambah yang profesional. Demokrat mencontohkan beliau sebagai Ketua Dewan Pembina. Demokrat rela dikurangi satu, yang lain layaklah kalau ada yang dikurangi, yaitu PKS.”

Selain itu, unsur “siapa” yang dibicarakan dalam berita ini, yaitu Presiden SBY dengan unsur “oleh siapa” dibicarakan, yaitu oleh narasumber berita, Sudi Silalahi (Mensesneg). Unsur “kapan”, yaitu Selasa (18/10/2011) dan unsur “di mana”, yaitu di Istana Merdeka Jakarta.

Dalam berita, terdapat unsur-unsur 5W+1H yang lengkap. Ini dibuktikan dengan topik pemberitaan ini adalah penjelasan Sudi Silalahi bahwa tidak ada tawar-menawar dalam proses pelantikan wakil menteri, yang dijelaskan oleh narasumber di sebuah tempat pada waktu yang telah dijelaskan oleh pembuat berita. Wartawan ingin benar-benar objektif dalam membuat berita. Inti dari pemberitaan menunjukkan bahwa narasumber mendukung kebijakan yang dilakukan presiden terkait dengan pelantikan wakil menteri. Ini berarti berita tersebut dapat digolongkan dalam pemberitaan yang menilai efektif adanya pelantikan wakil menteri.

**9) *Reshuffle* Kabinet Masih Belum Selesaikan Masalah Ekonomi  
(Rabu, 19/10/2011)**

**Skema.** Pada bagian *headline* tertera kalimat yang cukup panjang yaitu sebagai berikut ini.

Pengamat ekonomi Fauzi Ichsan menilai perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap menteri-menteri ekonomi sudah tepat. Namun, masih ada beberapa masalah yang tak bisa diselesaikan hanya dengan mengganti menteri.

Kalimat tersebut didukung oleh sebuah *lead* atau kalimat pengantar sebelum isi, yaitu sebagai berikut:

“Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini adalah masalah yang sifatnya struktural atau sistem di mana masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan pergantian menteri semata.” (detikcom, 19/10/2011)

Setelah membaca kutipan-kutipan tersebut, pembaca diajak untuk mengetahui lebih dalam tentang maksud dari kutipan tersebut. Wartawan selaku pembuat berita menyampaikan kalimat demi kalimat yang mengandung pertanyaan bagi pembacanya, karena kalimat-kalimat tersebut terkesan menggantung. Pembaca harus menuntaskan membaca berita tersebut secara keseluruhan. Latar informasi disampaikan dengan jelas pada berita tersebut, yaitu “Jakarta tanggal 19 Oktober 2011.” Dalam pemberitaan ini, terdapat banyak kutipan-kutipan dari hasil wawancara wartawan terhadap narasumber. Inti dari wawancara tersebut cenderung pada penilaian narasumber terhadap kinerja para menteri yang telah dilantik oleh presiden. Penilaian yang dimaksud merupakan gambaran narasumber tentang sepak terjang para menteri baru dalam bidangnya terdahulu.

**Kelengkapan berita.** Unsur-unsur 5W+1H dalam berita ini meliputi unsur “apa” yang menjadi inti berita, terletak pada bagian *headline*, yaitu merupakan pendapat narasumber bahwa perombakan kabinet yang dilakukan Presiden SBY terhadap menteri-menteri ekonomi sudah tepat. Namun, masih ada beberapa masalah yang tak bisa diselesaikan hanya dengan mengganti menteri. Selanjutnya, unsur “mengapa” dalam berita ini juga merupakan pendapat narasumber yang menyatakan “permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini adalah masalah yang sifatnya struktural atau sistem di mana masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan pergantian menteri semata.” Kemudian unsur “bagaimana” yang merupakan pendapat narasumber berita, yaitu “diperlukan waktu 6 sampai 12 bulan untuk Jero Wacik belajar mengenai sektor minyak, sementara permasalahan paling parah terjadi di sektor migas.”

Selain itu, unsur “siapa” yang dibicarakan dalam berita ini, yaitu para menteri yang baru dilantik oleh Presiden SBY, sedangkan unsur “oleh siapa” dalam berita ini, yaitu oleh narasumber berita, Fauzi Ichsan (Pengamat Ekonomi). Kemudian unsur “kapan” dalam berita ini, yaitu Rabu (19/10/2011) dengan unsur “di mana”, yaitu di Jakarta.

Pemberitaan yang terdiri dari 9 paragraf ini memiliki unsur-unsur kelengkapan berita yang lengkap. Wartawan menyajikan hasil wawancara secara objektif dalam sebuah berita tanpa memberikan

pendapatnya. Pemilihan gambar foto presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai profil berita, menggambarkan bahwa wartawan ingin langsung menyorot atau menegaskan sosok yang telah melakukan perombakan kabinet, yaitu SBY.

**10) Ical : Indonesia Besar karena itu Perlu Banyak Wakil Menteri  
(Kamis, 20/10/2011)**

Membaca judul yang dipilih wartawan dalam membuat berita, menunjukkan kesetujuan adanya pelantikan wakil menteri. Pada bagian skema, yaitu *headline* dari pemberitaan ini adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah melantik 13 wakil menteri (wamen) untuk membantu kerja para menterinya. Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menilai pengangkatan wamen ini adalah langkah yang tepat. Antara judul dengan isi berita tidak sepenuhnya sesuai, karena judul berita ini terkesan setuju dengan pengangkatan wakil menteri, akan tetapi pada bagian isinya, berita ini memuat pernyataan dari narasumber lain (Megawati Sukarno Putri) yang terkesan tidak mendukung adanya pengangkatan wakil menteri. Wartawan sepertinya ingin menampilkan pro kontra tentang pengangkatan wakil menteri dalam satu pemberitaan. Pada pemberitaan ini meskipun terdapat dua narasumber yang berbeda pendapat, menurut peneliti, wartawan kurang bisa menggali lebih dalam tentang topik yang ditanyakan kepada narasumber, hal ini terbukti dengan sedikitnya jumlah isi pemberitaan.

**Kelengkapan berita.** Unsur-unsur 5W+1H dalam berita ini meliputi unsur “apa”, yaitu “Presiden SBY telah melantik 13 wakil menteri untuk membantu kerja para menterinya. Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menilai pengangkatan wakil menteri ini adalah langkah yang tepat.” Unsur “mengapa” dalam berita ini merupakan pendapat narasumber pertama, yaitu “Indonesia ini besar karena itu perlu wakil menteri yang banyak.” Unsur “bagaimana” dalam berita ini, yaitu “para wakil menteri perlu *job description* yang jelas agar bisa menjalankan tugasnya masing-masing.”

Selanjutnya, unsur “siapa” yang dibicarakan dalam berita ini, yaitu Presiden SBY dan para wakil menteri yang telah dilantiknya. Unsur “oleh siapa” dibicarakan, yaitu oleh dua narasumber. Narasumber pertama adalah Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar) dan narasumber kedua adalah Megawati Soekarnoputri (mantan Presiden RI). Selain itu, unsur “kapan” narasumber dalam berita ini diwawancarai, yaitu Kamis (20/10/2011) untuk narasumber pertama dan Senin (17/10/2011). Unsur “di mana” narasumber diwawancarai, yaitu kedua narasumber diwawancarai di Jakarta.

Unsur-unsur 5W+1H dalam berita ini ditampilkan lengkap karena wartawan tidak ingin membuat pembaca bertanya-tanya ketika membaca berita yang ringkas ini. Dengan menampilkan unsur-unsur yang lengkap, pembaca akan mengetahui sepenuhnya apa yang ingin disampaikan oleh

wartawan. Dalam berita ini, terdapat pro dan kontra pendapat narasumber yang mendukung pelantikan wakil menteri maupun yang tidak mendukung. Namun, berita ini dapat dikatakan memuat keefektivan pelantikan menteri dan wakil menteri.

Berdasarkan analisis framing pada berita dalam media online detikcom, berita dalam media online detikcom yang menilai peristiwa pelantikan wakil menteri sebagai hal yang efektif lebih banyak dibandingkan dengan berita yang menampilkan ketidakefektivan pelantikan wakil menteri, sehingga dapat disimpulkan bahwa detikcom dalam menampilkan beritanya, memandang efektif peristiwa pelantikan wakil menteri yang dilakukan oleh presiden.

*Framing* pada umumnya ditandai dengan menonjolkan aspek tertentu dari realitas. Dalam penulisan sering disebut sebagai fokus. Berita secara sadar atau tidak diarahkan pada aspek tertentu. Akibatnya, ada aspek lainnya yang tidak mendapatkan perhatian yang tidak memadai dalam berita. Berita seringkali juga memfokuskan pemberitaan pada aktor tertentu. Tetapi efek yang segera terlihat adalah memfokuskan pada satu pihak atau aktor tertentu menyebabkan aktor lain yang mungkin relevan dan penting dalam pemberitaan menjadi tersembunyi (Eriyanto, 2005: 140-142).

Demikian pula dengan pemberitaan yang ditampilkan oleh Kompas.com dan Detikcom. Wartawan berusaha menampilkan pendapat yang berasal narasumber dari berbagai tokoh yang berbeda-beda. Wartawan sepertinya ingin memberitakan tentang keefektivan dan ketidakefektivan pelantikan wakil menteri



berdasarkan pendapat para tokoh. Pada media online detikcom, wartawan banyak menampilkan pendapat para tokoh yang mendukung pelantikan wakil menteri, sehingga seolah-olah wartawan detikcom mendukung pelantikan wakil menteri tersebut. Berbeda dengan berita yang disajikan oleh Kompas.com yang lebih banyak menampilkan pendapat tokoh yang tidak setuju dengan pelantikan wakil menteri. Dalam hal ini, wartawan memang sengaja memilih tokoh-tokoh yang tidak mendukung pelantikan wakil menteri untuk diwawancarai. Berita-berita yang ditampilkan oleh Kompas.com seolah-olah menunjukkan cara pandang wartawan yang tidak mendukung pelantikan wakil menteri.

Pada kedua media online, baik Kompas.com maupun Detikcom, tidak semua berita menampilkan *lead* atau pengantar untuk menuju bagian isi berita. Hal ini disebabkan bagian inti berita sengaja diletakkan oleh wartawan pada bagian awal berita atau *headline*. Wartawan sengaja menampilkan berita dengan lugas, ringkas dan padat sehingga tidak terkesan mengumbar kata-kata. Sifat tersebut menjadi ciri berita yang ditampilkan dalam media online, yang terus menerus berubah dalam hitungan hari bahkan dalam hitungan jam. Oleh sebab itu, wartawan berusaha menampilkan berita dengan menonjolkan inti berita se jelas mungkin pada bagian awal dan menampilkan kalimat-kalimat pendukung yang disertai dengan pendapat para tokoh untuk meyakinkan pembaca.

Melalui latar informasi yang ditampilkan dalam berita, wartawan ingin agar berita yang ringkas tetap memiliki detil informasi yang diperlukan dalam berita. Wartawan sengaja menampilkan latar informasi agar berita yang disajikan

terkesan lengkap meskipun ringkas. Latar informasi dalam berita akan mendukung kronologis peristiwa yang terjadi. Tanpa adanya latar informasi, maka urutan kejadian peristiwa tidak dapat diberitakan dengan baik.

Selanjutnya, dalam pemberitaan mengenai pelantikan wakil menteri, kedua media online Kompas.com dan Detikcom juga menampilkan kutipan hasil wawancara dengan para tokoh. Kutipan yang ditampilkan bertujuan memperjelas isi berita dan meyakinkan pembaca bahwa wartawan benar-benar telah mewawancarai tokoh tersebut. Kutipan tersebut dapat berupa kutipan langsung maupun tidak langsung. Pada Kompas.com, wartawan lebih banyak menampilkan kutipan langsung dari para tokoh, namun wartawan Detikcom lebih banyak menampilkan kutipan tidak langsung dari para tokoh. Perbedaan cara menampilkan kutipan tersebut menunjukkan wartawan dari kedua media online tersebut memiliki pemikiran yang berbeda tentang peristiwa pelantikan wakil menteri. Wartawan Kompas.com memiliki pemikiran yang *to the point* dan tidak bertele-tele, sedangkan wartawan Detikcom ingin menunjukkan gagasan yang dimilikinya dengan menggunakan kalimat-kalimat tertentu melalui kutipan tidak langsung yang ditampilkan.

Mengenai pernyataan wartawan, pada kedua media online di atas menampilkan cukup banyak pernyataan wartawan yang menunjukkan kesimpulan wartawan dari berita yang disajikan. Pernyataan wartawan mendukung pendapat narasumber atau bahkan tidak mendukung narasumber. Jika pernyataan wartawan mendukung narasumber, maka dapat dikatakan bahwa pemikiran wartawan sesuai

dengan pemikiran narasumber. Jika wartawan memberikan pernyataan yang tidak mendukung narasumber, menunjukkan wartawan memiliki pemikiran yang berseberangan dengan narasumber berita. Meskipun memiliki pemikiran yang berbeda dengan narasumber, bukan berarti wartawan memaksakan pendapat yang dimilikinya.

Wartawan membiarkan pembaca menilai dan membiarkan pembaca memilih setuju dengan pendapat narasumber atau setuju dengan pendapat wartawan. Melalui kalimat yang pro dan kontra tersebut, wartawan ingin mengajak pembaca agar lebih kritis dalam memahami suatu berita, tidak hanya mengiyakan isi berita yang disajikan oleh wartawan namun juga memberikan penilaian secara objektif. Demikian pula pada bagian penutup, sebagian besar berita yang ditampilkan oleh wartawan tidak memiliki kalimat penutup. Wartawan sengaja membiarkan akhir berita tanpa kalimat penutup yang bertujuan agar pembaca menyimpulkan sendiri berita yang disajikan.

Pada bagian kelengkapan berita, sebagian besar berita yang disajikan oleh kedua media online tersebut memuat unsur 5W+1H yang lengkap dan hanya beberapa yang tidak lengkap. Oleh karena itu, dapat dikatakan wartawan sengaja menampilkan unsur-unsur tersebut untuk mendukung berita yang disajikan agar terlihat lengkap dan menarik. Pembaca butuh untuk mengetahui kronologis peristiwa pelantikan wakil menteri, tanpa adanya kelengkapan unsur 5W+1H, maka pembaca tidak akan mengetahui. Sebuah berita juga akan menjadi berita yang membingungkan jika tidak disertai unsur-unsur tersebut. Wartawan

mengetahui betapa pentingnya unsur-unsur tersebut dalam berita, sehingga wartawan selalu berusaha untuk menampilkannya dalam berita.

Istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif (Basrowi, 2002: 204). Media online Kompas.com dan Detikcom berusaha membingkai realitas melalui sebuah framing yang disajikan berdasarkan interaksi wartawan dengan masyarakat. Melalui proses interaksi tersebut, kedua media tersebut menyimpulkan dan mengkonstruksi suatu realitas dengan cara yang berbeda. Kompas.com lebih banyak mengkonstruksi realitas dengan seobjektif mungkin tanpa memihak, namun dalam memberitakan peristiwa pengangkatan wakil menteri, Kompas.com terlihat lebih banyak menyuarakan rakyat daripada menyuarakan kepentingan pemerintah. Hal ini dilakukan karena suara rakyat dipandang lebih objektif dan mewakili berbagai kalangan.

Lain halnya dengan Detikcom yang berusaha mengkonstruksi realitas dengan cara memihak kepada pemerintahan SBY dalam menyajikan berita peristiwa pelantikan wakil menteri. Berita yang disajikan oleh Detikcom sarat dengan kepentingan pemerintah, dengan kata lain lebih banyak menyuarakan pemerintah daripada menyuarakan kepentingan masyarakat. Seperti diketahui bahwa kepemilikan Detikcom oleh perusahaan Paragroup yang memiliki hubungan dekat dengan Partai Demokrat menyebabkan Detikcom seolah-olah

sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan SBY. Oleh sebab itu, media online Detikcom lebih banyak memberitakan keefektifan peristiwa pelantikan wakil menteri dan ingin menonjolkan sisi positif dari pemerintahan SBY.

Kepuasan khalayak atas hasil reportase, dalam politik bergantung pada lambang-lambang politik (tokoh politik, tanda gambar partai, cara melaporkan sebuah peristiwa politik, dan sebagainya) yang disajikan kepada khalayak. Media massa yang piawai memainkan lambang-lambang niscaya akan memperoleh perhatian dari segmen khalayak dengan ideologi politik mereka masing-masing. Dalam konteks ini terbuka peluang sebuah media untuk bersikap partisan terhadap sebuah kekuatan politik, sehingga ia mempunyai khalayak yang setia (Hamad, 2004: 28).

Demikian juga dengan media online Detikcom yang bersikap partisan terhadap suatu kekuatan politik, yaitu Partai Demokrat. Detikcom berhasil dalam menampilkan sosok dari kalangan Partai Demokrat dan menyajikan berita-berita yang mendukung partai tersebut, sehingga Detikcom mendapatkan perhatian dari khalayak dari segmen tertentu, yaitu para pendukung Partai Demokrat. Sementara itu, Kompas.com lebih banyak menampilkan berita seobjektif mungkin dan lebih cenderung berpihak kepada masyarakat. Dengan demikian, Kompas.com berhasil mengambil hati dan perhatian masyarakat.

Pada kenyataannya, realitas sosial itu berdiri sendiri tanpa kehadiran individu baik di dalam maupun di luar realitas tersebut. Realitas sosial memiliki makna, manakala realitas sosial dikonstruksi dan dimaknai secara subjektif oleh

individu lain sehingga memantapkan realitas itu secara objektif (Burhan, 2007: 189). Realitas sosial seperti peristiwa pelantikan wakil menteri tidak akan bermakna apabila tidak dikonstruksi oleh individu, dalam hal ini peristiwa pelantikan wakil menteri dikonstruksi melalui tangan-tangan wartawan dengan pemikiran dan cara pandang yang berbeda satu dengan yang lain. Wartawan dalam menyajikan berita tentu saja memiliki ideologi masing-masing yang akan menyesuaikan dengan ideologi yang dimiliki oleh media online tempat mereka bernaung. Ideologi yang diusung oleh media online tersebut akan mengkonstruksi realitas tentang peristiwa pelantikan wakil menteri, kemudian melalui wartawan, peristiwa tersebut akan direkonstruksi sehingga akan memantapkan realitas tentang peristiwa pelantikan wakil menteri tersebut.